

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2000 - 2009**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas diponegoro

Disusun Oleh :

**DONNA DWI ISTIANTO
NIM. C2B604143**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2011**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Donna Dwi Istianto

Nomor Induk Mahasiswa : C2B604143

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

Judul Usulan penelitian Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK REKLAME DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2000 - 2009**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, SE. , MSi

Semarang, 6 Juli 2011

Dosen Pembimbing

(Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si.)
NIP. 19710725 1997022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Donna Dwi Istianto

Nomor Induk Mahasiswa : C2B604143

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

Judul Usulan penelitian Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK REKLAME DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2000 - 2009**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Juli 2011

Tim Penguji :

1. Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si. (.....)

2. Drs. Nugroho SBM, MSP. (.....)

3. Fitrie Arianti, SE., M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Donna Dwi Istianto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2000 - 2009”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 6 Juli 2011
Yang membuat pernyataan,

(Donna Dwi Istianto)
NIM: C2B604143

MOTTO

*Kita hidup untuk memberi sebanyak-banyaknya
Bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya*

PERSEMBAHAN

*Kepada ALLAH SUBHANA WATA'ALA
Yang telah memberikan jalan dan kemuliaan dalam menyelesaikan skripsi ini*

*Dan kepada kedua orang tua
Yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini*

ABSTRACT

Tax is one main government revenue, because role of the tax revenue are enormous, primarly to support succes development at the national and region. One of domestic tax revenue is advertisement tax. Advertisement tax is the main revenue of Kabupaten Semarang. This was prove during the 2000-2009 for the advertisement tax increase

The purpose of this research is to measure effect the population, number of industries and GDP to advertisement tax in Kabupaten Semarang. The result of this research is expected can contribute to benefit and input local government district in particular Kabupaten Semarang. The research method used is multiple linear regression.

The result of regression analysis show total industries and GDP is significant at $\alpha = 10$ percent of tax advertisement, while the total population is not significant. Simultaneous test results showed that overall independent variables (total population, total industries, and GDP) simultaneously to show its effect on advertisement tax revenue. R-Square value of 0,979 which mean 97,9 percent of advertising tax revenue variation can be explain from third variation of the independent variables, while the remaining 2,1 percent is explained by other factor beyond the model.

Key word : Advertisement Tax, Total Population, Total Industries, GDP and Kabupaten Semarang

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang utama, karena peranan sektor pajak sangatlah besar, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu komponen pajak daerah adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame merupakan salah satu macam sumber penerimaan pajak daerah yang penting bagi Kabupaten Semarang. Hal ini terbukti selama tahun 2000-2009 Pajak Reklame mengalami peningkatan.

Tujuan penelitian ini adalah mengukur seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Semarang khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Hasil analisa regresi menunjukkan bahwa Jumlah Industri dan PDRB signifikan pada $\alpha = 10$ persen terhadap penerimaan pajak reklame, sedangkan jumlah penduduk tidak signifikan. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen (Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan PDRB) secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Nilai R-Square sebesar 0,979 yang berarti sebesar 97,9 persen variasi Penerimaan Pajak Reklame dapat dijelaskan dari variasi ketiga variabel independen, sedangkan sisanya 2,1 persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Kata kunci : Pajak Reklame, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, PDRB dan Kabupaten Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya serta bantuan maupun bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Bimbingan, dorongan dan bantuan dari para pengajar, rekan-rekan serta ketulusan hati dan keramahan dari banyak pihak, sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan harapan dapat mencapai hasil sebaik mungkin. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua tercinta, untuk dorongan dan perhatian yang tidak pernah habis serta doa yang tidak pernah putus.
2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Evi Yulia P, SE., MSi, selaku Ketua Jurusan IESP ekstensi dan dosen pembimbing yang sabar dan baik hati.
4. Bapak Achma Hendra Setiawan, SE., M.Si. selaku dosen wali dan seluruh dosen IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Staf TU dan perpustakaan FE Undip, BPS Kabupaten Semarang serta BPS Provinsi Jawa Tengah terimakasih atas bantuannya.

6. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang akan digunakan demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 6 Juli 2011

Penulis

Donna Dwi Istianto

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan Ujian.....	iii
Halaman Penyataan Orisinalitas.....	iv
Halaman Motto Persembahan.....	v
<i>Abstract</i>	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	16
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
Bab II TELAAH PUSTAKA.....	19
2.1 Landasan Teori.....	19
2.1.1 Pengertian Pajak.....	19
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak.....	20
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	23
2.1.4 Unsur-Unsur dan Ciri-ciri Pajak.....	26
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	27
2.1.6 Sumber-sumber Pendapatan Daerah.....	28
2.1.7 Pajak Daerah.....	30
2.2 Pengertian Pajak Reklame dan Penelitian Terdahulu.....	34
2.2.1 Pengertian Pajak Reklame.....	34
2.2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.3 Kerangka Pemikiran.....	38
2.4 Hipotesis.....	39
Bab III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	41
3.1.1 Variabel Dependen.....	41
3.1.2 Variabel Independen.....	42
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.2.1 Jenis Data.....	42
3.2.2 Sumber Data.....	43

3.3 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4 Metode Analisis.....	44
3.4.1 Alat Analisi.....	44
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.4.3 Uji Statistik.....	49
 Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 53
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	53
4.2 Deskripsi Variabel.....	55
4.2.1 Penerimaan Pajak Reklame.....	55
4.2.2 Jumlah Penduduk.....	56
4.2.3 Jumlah Industri.....	58
4.2.4 PDRB.....	60
4.3 Analisis Data.....	62
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.3.2 Persamaan Regresi.....	66
4.3.3 Pengujian Statistik.....	68
3.4.2 Uji F.....	68
3.4.3 Uji T.....	68
3.4.2 Koefisien Determinan.....	69
4.4 Pembahasan.....	70
4.4.1 Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Reklame.....	70
4.4.2 Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Reklame.....	71
 Bab V PENUTUP.....	 72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	73
5.3 Saran.....	73
 DAFTAR PUSTAKA.....	 75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sumber-sumber Penerimaan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2006-2009 (dalam Milyar Rupiah)	5
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Rutin Kabupaten Semarang Tahun 2007-2009 (dalam Milyar Rupiah)	6
Tabel 1.3 Jumlah PAD dan Pajak Reklame Kabupaten Semarang	9
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang.....	10
Tabel 1.5 Jumlah Industri Kabupaten Semarang.....	11
Tabel 1.6 PDRB Kabupaten Semarang.....	13
Tabel 4.1 Data Jumlah Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Semarang Tahun 2000-2009	55
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2000-2009	57
Tabel 4.3 Data Jumlah Industri Kabupaten Semarang Tahun 2000-2009.....	59
Tabel 4.4 Data PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2000-2009.....	61
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas.....	66
Tabel 4.7 Model Regresi.....	67
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	68
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	12
Gambar 3.1 Pengambilan Keputusan korelasi (<i>Durbin-Watson</i>).....	41
Gambar 4.1 Penerimaan Pajak Reklame Kab. Semarang.....	60
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kab. Semarang.....	12
Gambar 4.3 Jumlah Industri Kab. Semarang.....	41
Gambar 4.4 Jumlah PDRB Kab. Semarang.....	60
Gambar 4.5 Uji Normalitas.....	12
Gambar 4.6 Uji Heteroskedastisitas.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Penelitian Kab. Semarang Tahun 2000-2009.....	77
Lampiran 2 Hasil Analisis Regresi.....	78
Lampiran 3 Chart.....	81
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerahdaerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000). Untuk itu tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2001). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1997).

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan

memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah (GBHN, 1999) merupakan tujuan bagian dari pembangunan nasional, serta untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi pelaksanaan pembangunan di daerah yang berdasar atas asas desentralisasi pemerintah kabupaten semarang berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk keperluan ini pemerintah kabupaten semarang berhak mengali sumber-sumber penerimaan daerah sebagai sumber dana rutin maupun pembangunan daerahnya.

Sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang program pembangunan nasional, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara professional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian dari integrasi dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan daerah (GBHN, 1999). Dengan adanya otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, daerah otonom diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri daerahnya, berbagai upaya dilakukan oleh daerah untuk dapat memaksimalkan penerimaan daerahnya, termasuk memaksimalkan PAD di daerah otonom yang bersangkutan.

Bagi pemerintah daerah pembiayaan di daerahnya berasal dari sumber penetapan pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan daerah pemerintah pusat, baik yang berupa hasil dan sumbangan. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut tegas untuk terus menggali sumber pendapatan di daerahnya dalam rangka mendapatkan dana untuk melaksanakan pembangunan. Apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain. Sebaliknya, setiap

daerah dapat melakukan inovasi untuk akses langsung ke luar negeri guna memperoleh devisa bagi daerahnya sendiri.

Dengan demikian peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dimana dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, adapun proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah, dimana sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya. Namun dalam kenyataannya, sumber dana pembangunan daerah yang berasal dari daerah sendiri saat ini hanya berkisar 10 persen saja. Rata-rata bantuan untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota dari pemerintah berkisar 75% (Devas,1989). Ini dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Sumber-sumber Penerimaan Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia
Tahun 2006-2009 (dalam Milyar Rupiah)

No	Uraian	2006		2007		2008		2009	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13.961,94	5,9	16.444,87	5,7	20.243,57	6,1	20.513,33	6,3
2	Dana Perimbangan	191.851,48	82,1	207.738,87	71,6	233.113,62	70,8	235.401,14	71,9
3	Penerimaan Lainnya	2.693,31	1,2	20.125,41	6,9	25.749,48	7,9	24.488,74	7,5
4	Pembiayaan Daerah	24.991,04	10,8	45.998,67	15,8	49.972,24	15,2	46.743,02	14,3
	Jumlah Penerimaan	233.497,79	100	290.307,80	100	329.078,93	100	327.146,24	100

Sumber :BPS Provinsi Jawa tengah tahun 2006-2009

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah penerimaan Kabupaten/Kota di Indonesia pada dasarnya terus mengalami peningkatan antara tahun 2006 sampai 2009, peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2008 yaitu sebesar 329.078,93 milyar Rupiah. Namun proporsi peningkatan penerimaan ini lebih besar diperoleh dari dana perimbangan (sumbangan/bantuan pemerintah) yang rata-rata menyumbang peningkatan 71,8 persen dengan proporsi terbesar tahun 2006 sebesar 82,1 persen, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang proporsi terbesar pada tahun 2009 sebesar 6,3 persen. Ini menunjukkan masih ketergantungannya daerah dalam pengelolaan keuangannya. Maka dalam upaya mengadakan perbaikan di sektor keuangan daerah diarahkan agar dapat mandiri sesuai dengan kemampuan pendapatan yang murni dari daerah. Salah satunya dengan peningkatan pendapatan asli daerah secara optimal. Ini juga dapat dilihat

dari sisi realisasi penerimaan rutin daerah. Seperti tercermin dalam realisasi penerimaan rutin Kabupaten Semarang antara tahun 2007 sampai dengan 2009 pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan
Kabupaten Semarang Tahun 2007-2009 (dalam Milyar Rupiah)

No	Uraian	2007		2008		2009	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	PAD	70,8	10,8	82,9	11,1	90,3	11,6
	Pajak Daerah	15,9		17,9		20,4	
	Retribusi Daerah	37,8		42,5		52,2	
	Bagian Laba Usaha Daerah	2,0		2,9		4,0	
	Lain-lain Pendapatan	15,1		19,6		13,7	
2	Dana Perimbangan	530,3	80,8	594,1	79,4	619,1	79,3
	Bagi hasil Pajak	29,8		44,0		45,4	
	Bagi Hasil Bukan Pajak	0,9		1,1		-	
	Dana Alokasi Umum	455,9		491,2		508,7	
	Dana Alokasi Khusus	43,7		57,8		65,0	
	Dana Kontijensi	-		-		-	
	Dana Darurat	-		-		-	
3	Pos Penerimaan Lain yang Sah	55,2	8,4	70,9	9,5	71,5	
	Jumlah	656,3	100	747,9	100	780,9	100

Sumber : Kabupaten Semarang dalam angka 2007-2009

Dari tabel 1.2 realisasi penerimaan rutin Kabupaten Semarang diatas, terlihat bahwa Kabupaten Semarang masih mengandalkan dana perimbangan dari sisi penerimaannya yang rata-rata mencapai 80 persen dari total penerimaan pada periode 2007-2009, sedangkan total rata pendapatan asli daerah hanya berkisar 11 persen. Walaupun bila dilihat secara keseluruhan total penerimaan rutin Kabupaten Semarang terus mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan asli daerah belum menjadi sumber penerimaan utama. Salah satu sektor PAD yang dijadikan tumpuan adalah pajak daerah. Di Kabupaten Semarang sendiri PAD dari sektor pajak daerah terus mengalami peningkatan

yang terbesar terlihat pada tahun 2009 sebesar Rp.20,4 milyar. Ini menjadikan potensi pajak daerah kabupaten semarang masih bisa di tingkatkan dan dikembangkan.

Pemerintah harus memperoleh pendapatan untuk membiayai barang-barang publiknya dan untuk program-program redistribusi pendapatannya. Pendapatan seperti itu berasal dari pajak-pajak yang dikenakan atas pendapatan pribadi dan pendapatan perusahaan, atas upah, atas penjualan barang-barang konsumen, dan atas hal lain-lain (Samuelson dan Nordhaus, 2001).

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. (Syuhada Sofian, 1997). Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan Negara sebagai modal pembangunan karena fungsinya sebagai sumber keuangan Negara (*budgetair*), serta mengatur kebijakan Negara dalam perekonomian dan social, terutama sektor swasta dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota penerimaan yang bersumber dari pajak merupakan sumber yang sangat diandalkan. Pada dasarnya penerimaan pajak

mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan penduduk dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan pajak daerah.

Salah satu penerimaan daerah adalah pajak reklame yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame (Marihhot P. Siahaan, 2005). Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Kesit Bambang Prakasa, 2005).

Pemberian beban bagi wajib pajak reklame memang bukan semata-mata karena meningkatkan kebutuhan dana untuk pembangunan saja, tetapi juga disebabkan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif yang dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR). NSR yang diperhatikan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame (Sunarto, 2005)

Variabel yang dipakai adalah tarif pajak reklame paling tinggi sebesar 25 persen yang ditetapkan dalam peraturan daerah selain NSR, realisasi pajak reklame juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu jumlah wajib pajak reklame, jumlah industry dan PDRB. Untuk dapat menilai besarnya pajak

reklame Kabupaten Semarang serta berapa besarnya rinciannya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah PAD dan Pajak Reklame Kabupaten Semarang
Tahun 2005 - 2009

Tahun	PAD (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Pajak Reklame (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi Terhadap PAD (%)
2005	410.313,70	-	423,62	-	0,10
2006	569.239,04	38,7	515,56	21,7	0,09
2007	656.531,04	15,3	528,55	2,5	0,08
2008	748.125,12	13,9	662,86	25,4	0,08
2009	781.021,79	4,4	703,28	6,1	0,09

Sumber: BPS Kabupaten Semarang Tahun 2005-2009

Dalam tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak Reklame Kabupaten Semarang dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan . Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar 25,4 persen sedangkan peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2007 sebesar 2,5 persen. Pada PAD selama 5 tahun terakhir juga selalu mengalami peningkatan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2006 sebesar 38,7 persen, sedangkan peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2008 sebesar 13,9 persen.

Syuhada Sofian (1997), dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan Pajak Reklame. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan (Dumairy, 1996). Besar kecilnya penerimaan

pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut (Musgrave, 1993)

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2007 dan 2008 pertumbuhan penduduk Kabupaten Semarang meningkat hingga 0,8 persen. Pertumbuhan penduduk terkecil terjadi pada tahun 2006 sebesar 0,4 persen. Pada tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Semarang tercatat sebesar 913.022 jiwa dan pada tahun 2009 jumlah penduduk menjadi 917.745 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,5%, maka terlihat jelas bahwa penduduk Kabupaten Semarang tiap tahunnya mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang
Tahun 2005 - 2009

Tahun	Jumlah Penduduk (Orang)	Pertumbuhan (%)
2005	896.048	
2006	899.276	0,4
2007	906.112	0,8
2008	913.022	0,8
2009	917.745	0,5

Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2009

Menurut Sutrisno (2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Jumlah industri adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah, maupun besar yang ada di Kabupaten Semarang. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat

diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya Jumlah Industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat (Syuhada Sofian, 1997).

Jumlah industri di Kabupaten Semarang dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 pertumbuhan jumlah industri mengalami penurunan hingga -9.74 persen yang merupakan penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir, sedangkan pada tahun 2008 pertumbuhan jumlah industri di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan sebesar 21,33 persen. Untuk dapat menilai besarnya Jumlah Industri Kabupaten Semarang serta berapa besarnya pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 1.5.

Tabel 1.5.
Jumlah Industri Kabupaten Semarang
Tahun 2005 - 2009

Tahun	Jumlah Industri (unit)	Pertumbuhan (%)
2005	1.397	-
2006	1.714	22,69
2007	1.547	-9,74
2008	1.877	21,33
2009	1.917	2,13

Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2009

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai dan jasa akhir yang dihasilkan oleh BPS terhadap suatu daerah (BPS,2003). Salah satu faktor penting untunk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam suatu periode tertentu dapat ditunjukkan oleh data PDRB daerah tersebut. Apabila nilai PDRB mengalami peningkatan maka akan membawa pengaruh positif pada kenaikan penerimaan daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang makan akan

semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, sehingga semakin tinggi pula kemampuan masyarakat tersebut untuk membayar Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Mardiasmo, 1995).

Sedangkan PDRB Perkapita adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu wilayah tertentu. Karena pajak daerah merupakan salah satu dari pajak daerah maka akan semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi penerimaan Pajak Daerah pada umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya.

Jumlah PDRB di Kabupaten Semarang dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2005 pertumbuhan PDRB di Kabupaten Semarang meningkat hingga 3,8 persen dan pada tahun 2006 pertumbuhan PDRB di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan kembali hingga 4,7 persen. Pada tahun 2008 jumlah PDRB di Kabupaten Semarang tercatat sebesar 1.357.303 dan pada tahun 2009 jumlah PDRB meningkat menjadi 1.416.555 maka terlihat jelas bahwa PDRB di Kabupaten Semarang tiap tahunnya mengalami peningkatan seperti terlihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6
PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2009
(atas dasar harga konstan tahun 1993)

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2005	1.197.589	-
2006	1.243.202	3,81
2007	1.301.835	4,72
2008	1.357.303	4,26
2009	1.416.555	4,37

Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2009

Sebagai salah satu sumber pembiayaan Negara, pajak memiliki peran penting bagi pembangunan, dengan pajak pemerintah dapat membiayai pembangunan secara mandiri karena pajak dipungut dari masyarakat. Sebagai elemen dari kebijakan pemerintah, pajak akan mempengaruhi perekonomian, ketika pajak dikenakan atas setiap individu, secara langsung akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat berupa penurunan pendapatan. Begitu juga jika pajak dikenakan kepada pengusaha, akan berdampak langsung pada keputusan menaikkan harga barang yang diproduksi, sehingga mempengaruhi produksi dan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha (Eko Sukmajaya, 2008)

Menurut Winardi, (1995) menyebutkan bahwa bertambah atau berkurangnya pendapatan perorangan serta pendapatan perusahaan, juga mempengaruhi besar kecilnya jumlah pendapatan pajak yang diterima pemerintah. Selain itu, system perpajakan yang menetapkan pajak dengan jumlah besar akan mempengaruhi keputusan pengusaha untuk berinvestasi. Dari asumsi ini dapat dilihat apakah jumlah industri di Kabupaten Semarang berpengaruh positif.

Pajak daerah dikatakan tinggi apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penerimaan pajak daerah dikatakan rendah

apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah karena tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB sering digunakan untuk melihat tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu Negara atau daerah. Dengan semakin tingginya PDRB di suatu daerah maka menunjukkan tingkat kemakmuran dan pembangunan yang tinggi pula. Sehingga dengan meningkatnya kemakmuran dan pembangunan yang ada, akan mendorong peningkatan reklame di daerah tersebut, ini berarti dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.

1.2 Perumusan Masalah

Proses pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang memerlukan biaya yang relatif besar. Banyak sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai penerimaan untuk melakukan pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah Pajak Reklame. Besarnya penerimaan Pajak Reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah tersebut. Disamping itu partisipasi dan peran masyarakat akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan Pajak Reklame.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Semarang adalah adanya potensi pajak reklame yang belum digunakan secara maksimal. Ini terbukti sedikitnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD, padahal terdapat potensi yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu Pajak Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti hanya dibatasi mengenai jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB 2000-2009 di Kabupaten Semarang.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk di kabupaten semarang terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana pengaruh jumlah industri di kabupaten semarang terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang ?
3. Bagaimana pengaruh PDRB di Kabupaten semarang terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kabupaten semarang. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis berapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis berapa besar pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang.

3. Menganalisis berapa besar pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang.
4. Menganalisis secara bersama-sama berapa besar pengaruh jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah :

1. Bagi Penulis

Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan potensi Pajak Daerah di Kabupaten Semarang, khususnya Pajak Reklame.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi pajak Reklame Kabupaten Semarang.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Semarang dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang.

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang peningkatan penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Semarang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang memberikan alur penulisan dan hipotesis yang dikemukakan dalam penulisan ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

Bab IV Hasil dan Analisis

Pada bab ini akan menguraikan tentang diskripsi dan objek penelitian melalui gambaran umum serta membahas dan menganalisis data-data yang didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan dengan analisis regresi.

Bab V Penutup

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu, baik untuk pemerintah daerah maupun penelitian selanjutnya.

BAB II
TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli. Menurut Usman dan K Subroto (1980) pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Brotodihardjo, 1991).

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan

negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat/dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (Waluyo dan Wirawan, 2003).

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak

Menurut (R. Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2002) secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara yaitu:

1. Untuk membatasi konsumsi dengan demikian dapat mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.

4. Untuk memodifikasi pola investasi.
5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
6. Untuk mobilisasi surplus ekonomi.

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (Suparmoko, 1986) didasarkan pada:

1. Prinsip kesamaan / keadilan (*equity*)

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. Prinsip kepastian (*certainty*)

Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparat perpajakan.

3. Prinsip kecocokan / kelayakan (*convencien*)

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang.

4. Prinsip Ekonomi (*economy*)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahteraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Pajak dilihat dari fungsinya menurut (Suparmoko, 1992; Munawir, 1992; Guritno, 1992 dan 1994) mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi Budgeter (penerimaan negara)

Pajak berfungsi budgeter artinya pajak bersifat kontraksi terhadap dana masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk APBN, sedangkan sisi lain APBN yaitu sisi belanja atau pengeluaran berefek

multiplayer bagi perekonomian negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *Regulereend* (pengatur)

Pada fungsi *regulereend*, pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, artinya pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjalankan perannya. Peran pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen mencapai tujuan masing-masing.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut (S. Munawir, 2000) dalam hukum pajak terdapat berbagai pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak:

1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya

Dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Langsung

adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaannya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

Dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Pusat atau Negara

adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:

1. Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.
2. Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
3. Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : bea masuk, pajak ekspor.

b. Pajak Daerah

adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.

Dilihat dari sifatnya dan lembaga pemungutnya, Pajak Reklame termasuk pajak yang bersifat obyektif dan merupakan pajak daerah. Argumennya adalah karena obyek pajaknya, penyelenggaraan reklame dan lokasi reklame berada di daerah yang bersangkutan. Orang yang menyelenggarakan reklame secara jelas mengambil keuntungan darinya dan eksternalitas yang mungkin timbul

secara jelas mengenai lingkungan sosial dalam alam di wilayah daerah tersebut.

2.1.4 Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka dapat disebutkan unsur-unsur pajak adalah (Rochmat Soemitro, 1990):

1. Adanya penguasaan pemungut pajak
2. Adanya subjek pajak
3. Adanya objek pajak
4. Adanya masyarakat atau kepentingan umum
5. Adanya surat ketetapan pajak (SKP)
6. Adanya Undang-Undang pajak yang mendasari

Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera. Ciri-ciri yang melekat pada pajak (Ahmad Tjahjono dan M. Fakhir Husein, 2000):

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Waluyo dan Wirawan, 1999) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Withholding System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak yang ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2. Official Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

3. Self Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

2.1.6 Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meningkatnya kewenangan

Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah. Namun harus pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas 5 prinsip yaitu :

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkuat Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Azas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan Azas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan (*medebewid*).
4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.

5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2.1.7 Pajak Daerah

Menurut Undang–undang No.18 Tahun 1987, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini terdiri atas:

1. Pajak Daerah tingkat I (Propinsi)

Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota)

Contoh: Pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel dan Restoran

Adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Menurut peraturan daerah No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, yang dimaksud dengan Pajak Hotel dan Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran. Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang atau pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran, sedangkan obyek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran. Besarnya tarif pajak adalah 10% dari jumlah pembayaran.

2. Pajak Hiburan

Adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Pajak Hiburan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Subyek pajak

ini adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan dan objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan hiburan.

3. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan obyek pajak ini adalah semua penyelenggaraan reklame. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

4. Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2001. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan obyek pajak ini adalah setiap pengguna tenaga listrik.

5. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1998. Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C, sedangkan obyek pajak ini adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Besarnya tarif pajak ini ditetapkan sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

6. Pajak Permanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak ini adalah pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan objek pajak ini adalah pengambilan air bawah tanah dan air permukaan. Besarnya tarif pajak ini ditetapkan sebesar 20% dari nilai perolehan air.

7. Pajak Parkir

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain memungut pajak, Pemerintah Daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Seperti dengan pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi. Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.2 Pengertian Pajak Reklame dan Penelitian Terdahulu

2.2.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian laba BUMD
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari pajak.

Dapat dijelaskan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Obyek pajak reklame sebagaimana dimaksud adalah Reklame Megatron, Billboard, Papan Nama, Baliho, Kain, Melekat/Stiker/Poster, Selebaran, Berjalan, Udara, Film/Slide

dan Peragaan. Pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan terus menerus oleh negara. Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame. Pajak reklame adalah pajak daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU No 18 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan UU No 34 tahun 2000. Pembaharuan Undang-undang didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, (Marihot P. Siahaan, 2005) dan juga untuk memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan (Marihot P. Siahaan, 2005).

2.2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu :

1. Dini Nurmayati (2010) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang”. Dengan menggunakan regresi berganda. Variabel yang digunakan adalah penerimaan pajak reklame kota semarang, pertumbuhan penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB.

Model analisis yang digunakan :

$$\text{LOGPjk_Rekl} = \beta_0 + \beta_1 \text{LOGPddk} + \beta_2 \text{LOGIndst} + \beta_3 \text{LOGPDRB} + e$$

Dimana:

PJK_REKL = Penerimaan Pajak Reklame (dalam rupiah)

PDDK = Pertumbuhan Penduduk (dalam jiwa)

INDUST = Jumlah Industri (dalam angka)

PDRB = Jumlah PDRB (dalam rupiah)

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Variabel Jumlah Penduduk (PDDK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame (PJK_REKL), Variabel Jumlah Industri (INDUST) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame (PJK_REKL), Variabel Jumlah PDRB Perkapita (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame (PJK_REKL), dan Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel penerimaan

Pajak Reklame secara berturut – turut adalah variabel jumlah penduduk, variabel jumlah industri, dan yang terakhir adalah variabel PDRB.

2. Arif Budi Wibowo (2009) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Kendal”. Dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pajak Reklame. Alat analisis yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y =Penerimaan Pajak Reklame

X₁=Jumlah wajib pajak reklame (orang/badan)

X₂=Pendapatan Wajib Pajak (Rp)

X₃=Pendapatan Perkapita (Rp)

Dari analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah wajib pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame, pendapatan wajib pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.

3. Sutrisno (2002) dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kabupaten Semarang”. Dengan menggunakan

analisis regresi. Variabel yang digunakan adalah inflasi, pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah kendaraan, jumlah pelanggan listrik, jumlah petugas pajak, sedangkan yang mempengaruhi pajak reklame adalah laju inflasi, jumlah penduduk, jumlah industri, dan petugas pajak. Namun setelah dianalisis inflasi tidak berpengaruh signifikan dengan t-hitung, sedangkan jumlah penduduk, berpengaruh positif sebesar 1 persen akan mendorong meningkatnya pajak reklame 23,5 persen. Dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah.

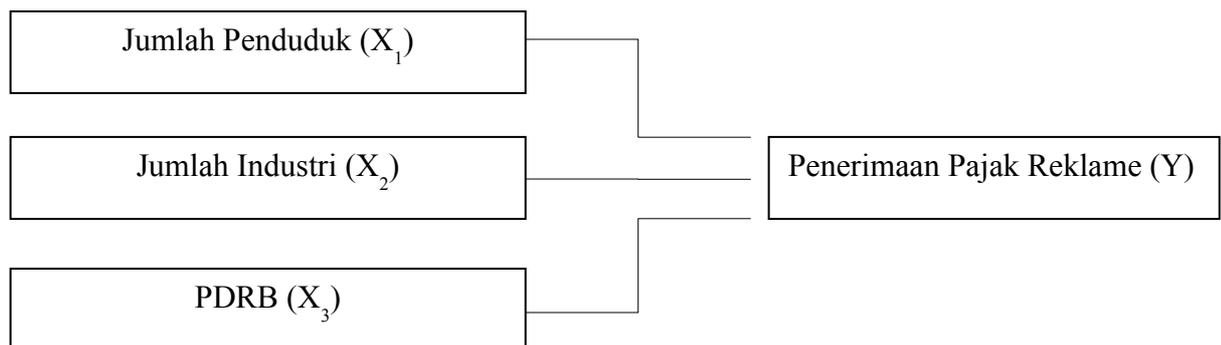
2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tanggung jawab warga negara dalam pembangunan dan juga merupakan imbalan dari warga negara terhadap manfaat yang merupakan perolehan dari warga negara terhadap manfaat yang mereka peroleh dari produk yang dihasilkan oleh negara. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pajak Reklame. Pajak yang mempunyai peranan yang penting bahkan diharapkan dapat menempati kedudukannya sumber penerimaan yang potensial. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu pemerintah daerah senantiasa berusaha menggali faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di daerahnya.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti yaitu jumlah Penduduk, jumlah industri dan PDRB yang diduga mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan suatu uji statistik untuk menguji dan menganalisis apakah benar-benar variabel tersebut mempunyai peningkatan atau penurunan terhadap Pajak Reklame.

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka diatas, maka secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). Setelah adanya kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga jumlah Penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang.
2. Diduga Jumlah industri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang.
3. Diduga PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang.
4. Diduga Secara bersama-sama Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, obyek, segala peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif/kualitatif. Hasil pengukuran suatu variabel bisa konstan atau tetap, bisa juga berubah-ubah (Nana Sudjana, 1999). Definisi operasional merupakan pengubahan konsep yang masih berupa abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan (Hadi, 1996) Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka dalam penelitian ini yang dijadikan variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya tergantung pada nilai variabel lain yang merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada variabel bebas (variabel independen). Dalam penelitian ini pajak reklame yang

merupakan salah satu pajak Kabupaten Semarang dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan di Kabupaten Semarang dari tahun 2000 sampai dengan 2009 dijadikan sebagai variabel terikat, variable pajak reklame ini diukur dalam rupiah.

3.1.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel independen sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk

Adalah jumlah penduduk pertengahan tahun di Kabupaten Semarang. Data jumlah penduduk diukur dalam satuan orang.

2. Jumlah industri

Adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah maupun besar yang ada di Kabupaten Semarang. Data jumlah industri diukur dalam satuan unit.

3. PDRB

Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor) dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dan dihitung menurut harga konstan. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993. PDRB diukur dalam satuan rupiah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang

sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menentukan lokasi penelitian di Kabupaten Semarang. Data yang digunakan adalah data sekunder selama Sepuluh tahun. Adapun data yang digunakan adalah:

1. Penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Semarang tahun 2000-2009
2. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun 2000-2009
3. Jumlah industri Kabupaten Semarang tahun 2000-2009
4. PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 Kabupaten Semarang tahun 2000-2009

3.2.2 Sumber Data

Sedangkan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Povinsi Jawa Tengah
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang
3. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Semarang

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan/data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait (Suharsimi Arikunto, 2002). Laporan-laporan yang terkait dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame yang menyangkut jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, buletin, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Alat Analisis

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 1999).

Persamaan Regresi dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$\text{Log} Y = \alpha + \beta_1 \text{Log} X_1 + \beta_2 \text{Log} X_2 + \beta_3 \text{Log} X_3 + e$$

Dimana:

Y= Penerimaan pajak reklame (dalam ribuan rupiah)

X₁= Jumlah penduduk (orang)

X₂= Jumlah industri (unit)

X₃= PDRB (dalam jutaan rupiah)

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan metode regresi dalam penelitian ini menyebabkan perlu dilakukan pengamatan terhadap kemungkinan penyimpangan asumsi klasik.

Menurut Damodar (Gujarati, 1998) terdapat 7 (tujuh) asumsi klasik yang harus diambil dalam penggunaan model regresi ini, namun ekonometrik hanya 4 (empat) yang dianggap penting. Keempat asumsi tersebut adalah:

A. Uji Normalitas

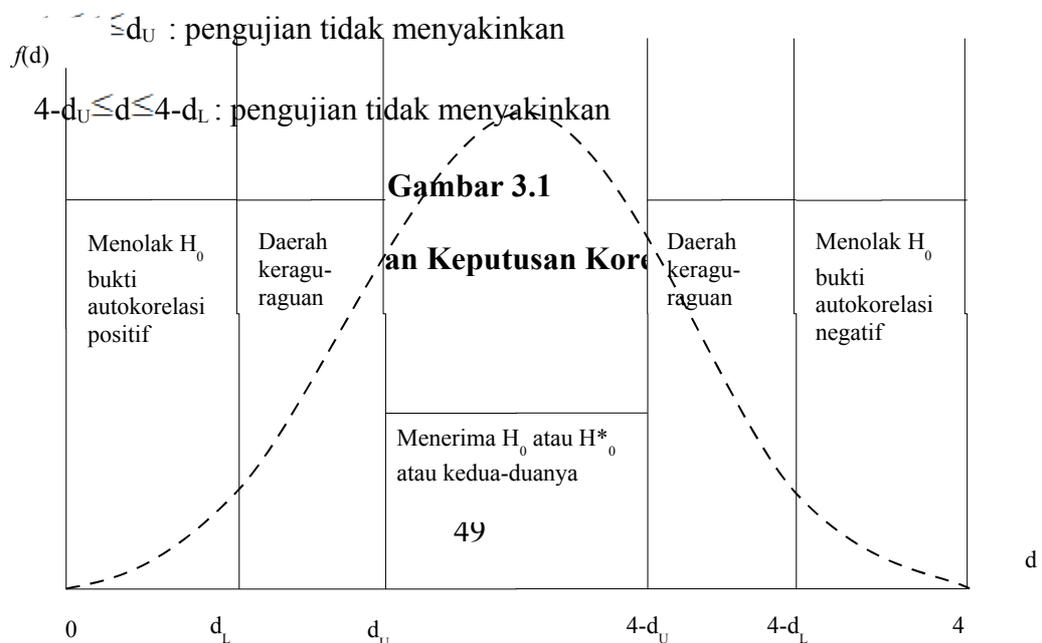
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengambilan kesimpulan dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot. Bila histogram hampir menyerupai genta dan titik *variance* semuanya mengikuti arah garis diagonal menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas artinya layak pakai (Imam Ghozali, 2001)

B. Uji Terhadap Gejala Autokorelasi

Autokorelasi yaitu adanya kesalahan-kesalahan yang muncul pada data runtun waktu (*time series*). Asumsi autokorelasi berimplikasi bahwa varian U_i dan U_j

adalah sama dengan nol. Deteksi gejala autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistic *Durbin-Watson de Statistic Test* (gujarati, 2003) dan mekanisme tes DW sebagai berikut:

- a. Jika hipotesis H_0 adalah bahwa tidak ada serial korelasi positif, maka jika:
 - $d < d_L$: menolak H_0
 - $d > d_U$: tidak menolak H_0
 - $d_L \leq d \leq d_U$: pengujian tidak menyakinkan
- b. Jika hipotesis nol H_0 adalah bahwa tidak ada serial korelasi negatif, maka jika:
 - $d < 4 - d_L$: menolak H_0
 - $d > 4 - d_U$: tidak menolak H_0
 - $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$: pengujian tidak menyakinkan
- c. Jika H_0 adalah 2 ujung yaitu bahwa tidak ada serial korelasi positif atau negatif, maka jika:
 - $d < d_L$: menolak H_0
 - $d > 4 - d_L$: menolak H_0
 - $d_U < d < 4 - d_U$: tidak menolak H_0



C. Uji Terhadap Gejala Heteroskedastisitas

Asumsi penting dalam regresi Linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam regresi populasi adalah Homoskedastik, yaitu semua gangguan mempunyai varians yang sama. Dalam model regresi mungkin pula ditemui gejala heteroskedastik. Konsekuensinya yang timbul adalah formula OLS akan menaksir terlalu rendah varians yang sebenarnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat residual plot pada persamaan regresi. Apabila residual plot yang terjadi, tidak menggambarkan adanya pola tertentu yang sistematis (hubungan linier maupun kuadratik), serta lebih bersifat acak, maka dapat dikatakan persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas (tidak adanya masalah heteroskedastisitas). Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghazali, 2001). Heteroskedastisitas yaitu variabel pengganggu (e) memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya atau varian antar variabel independen tidak sama. Hal ini melanggar asumsi heteroskedastisitas

yaitu setiap variabel penjelas memiliki varians yang sama (konstan). Heterokedastisitas lebih sering muncul pada data cross section dibandingkan data time series (Mudrajat Kuncoro,2001).

Dasar Pengambilan Keputusan, jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Uji Terhadap Gejala Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan (independen) dari model regresi (Damodar Gujarati. 1997:157). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi. maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Imam Ghozali.2005 : 91). Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam regresi adalah Menganalisis matrik kolerasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi-indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

Multikolinieritas dapat dilihat juga dari Nilai toleran dan lawannya, serta *variance inflataion factor* (VIF). Toleran mengukur Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan auxiliary regressions untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R² regresi persamaan utama lebih besar dari R² auxiliary regressions maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

3.4.3 Uji Statistik

Analisis dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif yaitu dengan model regresi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan hipotesis untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut

H₀ : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB.

H₁ : $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikansi variabel jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

dimana :

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen termasuk konstanta

n : jumlah sampel

Apabila nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila, F hitung $<$ Ftabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2005). Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai F hitung dengan F tabel dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t merupakan metode pengujian koefisien regresi untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing koefisien yang mempengaruhi penerimaan pajak Reklame Kabupaten Semarang digunakan uji t dengan menggunakan hipotesis nol. Dengan rumus yang digunakan adalah :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\beta_t}{S_e(\beta)}$$

Dimana : β_t = koefisien regresi

S_e = standart deviasi

Kriteria pengujian :

1. $H_0 : \beta_1 \leq 0$ tidak terdapat pengaruh positif antara variabel jumlah penduduk secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

$H_1 : \beta_1 > 0$ terdapat pengaruh positif antara variabel jumlah penduduk secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

2. $H_0 : \beta_2 \leq 0$ tidak terdapat pengaruh positif antara variabel jumlah industri secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

$H_1 : \beta_2 > 0$ terdapat pengaruh negatif antara variabel jumlah industri secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

3. $H_0 : \beta_3 \leq 0$ tidak terdapat pengaruh positif antara variabel PDRB secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

$H_1 : \beta_3 > 0$ terdapat pengaruh positif antara variabel PDRB secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

Cara melakukan uji t melalui pengambilan keputusan sebagai berikut:

Membandingkan nilai statistik t dengan kritis menurut tabel.

1. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, dengan derajat keyakinan 90 persen (probability < 0,10), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima ini berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, dengan derajat keyakinan 90 persen (probability < 0,10), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak ini berarti tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinan (R²)

R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan digunakan koefisien determinasi (R²). Koefisien determinasi (R²) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang di jelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati. 2003). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum Y_1 X_{1i} + \beta_2 \sum Y_2 X_{2i} + \beta_3 \sum Y_{3 \times 3i}}{\sum Y_1^2}$$

Nilai R² yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah: